

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, maka kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bagi Pelaku UMKM di Kota Batu Selama Masa Pandemi Covid-19

Pelayanan perizinan berusaha yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Batu tetap berjalan meskipun ada Pandemi *Covid-19*. Ada perbedaan pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP apabila dibandingkan sebelum terjadinya Pandemi *Covid-19*, dimana para pegawai DPMPTSP banyak yang bekerja dari rumah dan sosialisasi tentang perizinan berusaha juga tidak dilakukan karena anggaran dana untuk sosialisasi dipangkas untuk dialihkan pada kepentingan penanganan penyebaran *virus Covid-19*. Selain itu, jumlah pemohon yang mengunjungi DPMPTSP untuk mengurus izin usaha sedikit jumlahnya.

DPMPTSP Kota Batu sudah menerapkan sistem OSS RBA sejak sistem tersebut berlaku secara efektif di daerah, tepatnya pada bulan Agustus 2021. Sayangnya, penerapan sistem OSS RBA dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha kepada para pemohon masih sering mengalami kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut antara lain adalah kurangnya kemampuan dan keahlian pegawai DPMPTSP Kota Batu dalam

mengoperasikan sistem OSS RBA, *server* pada sistem OSS RBA yang sering *down*, dan kesalahan penentuan KBLI yang terdapat pada sistem OSS RBA.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA di DPMPTSP Kota Batu dapat dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha, Namun apabila Pelaku Usaha belum bisa mengoperasikan sistem OSS RBA secara mandiri, maka DPMPTSP akan memberikan pendampingan. Pendampingan tersebut berupa pelayanan berbantuan secara interaktif dengan pemohon dan pelayanan bergerak yang diwujudkannyatakan melalui program Mampir Boss.

## 2. Kemudahan dalam Hal Perizinan Berusaha dan Kemudahan Lainnya Bagi Pelaku UMKM di Kota Batu Selama Masa Pandemi Covid-19

Sistem OSS RBA yang berlaku secara efektif di DPMPTSP Kota Batu pada saat terjadi Pandemi Covid-19 telah memberikan kemudahan dalam hal perizinan berusaha bagi Pelaku UMKM. Kemudahan yang dirasakan oleh Pelaku UMKM dalam hal perizinan berusaha antara lain adalah proses pendaftaran izin usaha menjadi lebih cepat dan sederhana, pelayanan perizinan berusaha yang tidak memungut biaya, dan adanya pendampingan bagi Pelaku UMKM dalam mendaftarkan izin usaha.

Kemudahan lain yang dirasakan oleh Pelaku UMKM Kota Batu antara lain adalah mendapatkan pendampingan dan pelatihan dari PLUT guna mengembangkan kegiatan usaha, memperoleh bantuan dana dari Pemerintah, dan pembebasan biaya untuk mendapatkan sertifikasi produk halal. Meskipun begitu ada permasalahan terkait pelatihan dan pendampingan yang diberikan

oleh PLUT kepada Pelaku UMKM. Ada beberapa Pelaku UMKM yang menilai bahwa pelatihan yang diberikan PLUT tidak tepat guna, kurang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing Pelaku UMKM, cenderung monoton, tidak bervariasi, dan tidak berkelanjutan. Selain itu, juga terdapat kritik yang diberikan oleh beberapa Pelaku UMKM kepada 5 konsultan yang disediakan oleh PLUT untuk bertugas memberikan pembinaan bagi Pelaku UMKM. Ada beberapa Pelaku UMKM yang menilai bahwa cara kerja 5 konsultan tersebut dalam memberikan arahan dan pembinaan masih kurang aktif.

Mengenai kemudahan dalam mendapatkan bantuan dari Pemerintah kepada Pelaku UMKM, tidak semua Pelaku UMKM mendapatkan bantuan dana tersebut dikarenakan 3 hal. Pertama, permohonan permintaan bantuan dana ditolak oleh Pemerintah padahal Pelaku UMKM yang bersangkutan sudah memenuhi segala persyaratan yang ada. Kedua, bantuan dana dari Pemerintah hanya difokuskan dan ditargetkan untuk Pelaku UMKM di sektor atau jenis usaha tertentu saja. Selain itu, memang ada beberapa Pelaku UMKM yang tidak mengajukan permohonan permintaan bantuan dana.

Ada beberapa Pelaku UMKM yang juga tidak memahami manfaat dan kemudahan-kemudahan yang diperoleh dengan mengantongi izin usaha. Beberapa Pelaku UMKM hanya memandang bahwa izin usaha hanyalah sebatas syarat administratif saja dan tidak merasakan kemudahan serta manfaat lainnya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut ini:

### 1. Kepada Pemerintah Pusat:

- a. Memberikan pelatihan yang memadai kepada pegawai DPMPTSP Kota Batu dalam mengoperasikan sistem OSS RBA dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha kepada para pemohon.
- b. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan *server* yang mendukung kelancaran sistem OSS RBA untuk mengantisipasi terjadinya *server* yang *down*.

### 2. Kepada DPMPTSP Kota Batu:

- a. Menggencarkan sosialisasi dan penyuluhan tentang tata cara pendaftaran izin usaha, terutama mengenai penentuan KBLI yang berada di sistem OSS RBA. Sosialisasi dan penyuluhan dengan memberikan informasi terkait tata cara penentuan KBLI melalui website resmi yang dimiliki oleh DPMTSP Kota Batu yaitu: [www.dpmptsp.batukota.go.id](http://www.dpmptsp.batukota.go.id) .
- b. Meningkatkan sosialisasi tentang manfaat serta kemudahan-kemudahan yang diperoleh Pelaku UMKM apabila sudah mengantongi izin usaha.
- c. Dalam hal menyelenggarakan program Mampir Boss, DPMPATP Kota Batu dapat menggencarkan sosialisasi mengenai keberadaan program Mampir Boss melalui media sosial dan media massa.

d. Meningkatkan kerja sama dan juga menjalin komunikasi aktif dengan perangkat desa untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh para Pelaku UMKM di masing-masing desa. Setelah mengetahui permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Pelaku UMKM, DPMTSP Kota Batu dapat memberikan solusi terbaik untuk memecahkan tantangan dan permasalahan tersebut.

3. Kepada PLUT Kota Batu:

- a. Melakukan inovasi dan pembaharuan terhadap pelatihan dan pendampingan yang diberikan agar tidak monoton dengan menyebarkan kuesioner yang menanyakan soal kebutuhan dan kepentingan yang dimiliki oleh Pelaku UMKM.
- b. Mengawasi kinerja konsultan dalam memberikan bimbingan kepada Pelaku UMKM untuk mengembangkan kegiatan usaha. Sudah sebaiknya juga dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang diberikan oleh konsultan tersebut dalam membimbing Pelaku UMKM.

4. Kepada Pelaku UMKM:

Pelaku UMKM harus lebih proaktif dan berinisiatif dalam mencari informasi mengenai tata cara pendaftaran izin usaha, pelatihan dan pembinaan UMKM, bantaun dana dari Pemerintah, dan lain sebagainya. Pada zaman yang semakin modern ini, media massa dan media sosial sangat mudah diakses, oleh karena itu sebaiknya Pelaku UMKM menggunakan kedua *platform* tersebut untuk menggali informasi mengenai hal-hal serta

kegiatan-kegiatan yang dapat semakin mendukung berjalannya kegiatan usaha yang dimiliki.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bungin, B, 2006, *Metode penelitian kualitatif*. Rajawali Pub, Depok
- Deddy Mulyadi, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Muhammad Muhyi dkk, 2018, *Metodelogi Penelitian*, Adi Buana University Press, Surabaya
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- N.Spelt dan J.B.J.M ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya
- Pung Karnantohadi, 2020, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Siti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, CV MFA, Bantul
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Yogyakarta

### Hasil Penelitian

Ari Nurdiana, 2021, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Angkutan Umum (Studi Kasus Terminal Pakupatan Kota Serang)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

Elizabeth Helyanti Ongan, 2021, *“Implementasi Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di Kabupaten Sikka.”*. Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Fitria Anggraini, 2018 *“Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018)”*, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Nur Lia Lahim, 2017, *Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Enrekang*, Penulisan Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Sri Astuti Ningsih, 2021, *“Inovasi Pelayanan Publik Di Masa Covid-19. (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Jambi)”*, Penulisan Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thana Saifuddin Jambi

Y. Sri Pudyatmoko, 2007, *“Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanganan Perzinan Berkait dengan Kegiatan Usaha di Kabpuaten Sleman”*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

### Jurnal Hukum

Agnes Ariningtyas dan Yohanes Suwanto, 2022, *“Kajian Kritis Terhadap Undang-undang Cipta Kerja Berkaitan Dengan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM”*. Vol.I/No.3/2022. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Ahmad Redi, dkk, 2022, *“Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum, dan Mewujudkan*



*Negara Kesejahteraan*”, Vol.VI/No.1/2022, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Claessia Siriket Wibisono, dkk, 2022, “*Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang*”, Vol. II/No.2/2022, *Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

Frisxa Damayanti dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2022, “*Kemudahan Bagi UMKM Dalam Mengembangkan Usaha: Perspektif Undang-undang Cipta Kerja*”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. X/No.7/2022, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ilyas and Suhartono dalam Hukum Pajak Material sebagaimana dikutip oleh Jerry Shalmont, Grace I. Dermawan, dan Dora Dominica, 2022, “*Insentif Pajak Penghasilan Bagi Pelaku UMKM: Reformasi, Keringanan, dan Kepatuhan*”, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, Vol. XXXVIII/No.2/2022, *Jurnal Hukum Jutitia Et Pax*

Jerry Shalmont, Grace I. Dermawan, dan Dora Dominica, 2022, “*Insentif Pajak Penghasilan Bagi Pelaku UMKM: Reformasi, Keringanan, dan Kepatuhan*”, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, Vol. XXXVIII/No.2/2022, *Jurnal Hukum Jutitia Et Pax*

Michelle Lucky Madelene, Jinner Sidauruk, Debora, 2022, “*Implementasi Undang-undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM*”, Vol.I/No.1/2022, *Nommensen Journal of Business Law*, Fakultas Hukum Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, dkk, 2019, “*Pelaksanaan Online Single Submission Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah*”, *Dipenegoro Law Journal*, Vol VIII/No 2/2019, Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro

Muhammad Mova Al afghani, 2021, “*Konsep Regulasi Berbasis Resiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-undang Cipta Kerja*”, *Jurnal Konstusi*, Vol.18,

Sahidin Nasir Sarabiti, 2018, “*Peran Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kota Batu)*”, *Institutional Repository*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Program Studi Ilmu Pemerintahan), Universitas Muhammadiyah Malang

Susilo Wardani, 2017, “*Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Era Globalisasi Ekonomi Global*”, *Prosiding Seminar Nasional (Kerjasama Pusat Studi Perizinan UMS)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Syarah Syam Amir, dkk, 2022, “*Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*”, *Supermasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya*, Vol. XVII/No.1/2022, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Twotik Lestraningtyas, Muhammad Roqib, 2020 “*Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Based Approach)*”, *Jurnal Jendela Hukum*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **Internet**

Azmy, M.Ulul, Tidak Punya Izin Usaha, 1.600 UMKM di Kota Batu Gagal Dapat Bantuan Usaha, kumparan.com, URL: <https://kumparan.com/tugumalang/tidak-punya-izin-usaha-1-600-umkm-di-kota-batu-gagal-dapat-bantuan-usaha-1wPGCmIpIt5/full>. Diakses 13 Oktober 2022

Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022, URL: <https://dpmptsp.batukota.go.id/standar-pelayanan>. Diakses pada 4 Mei 2023.

Fajarwati Farik, Gandeng E-Commerce Pasarkan Produk UMKM Kota Batu Secara Digital, radarmalang. URL: <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-batu/17/10/2021/gandeng-e-commerce-pasarkan-produk-umkm-kota-batu-secara-digital/>. diakses 13 Oktober 2022

Hukum Online. Pemerintah Targetkan Penyempurnaan Sistem OSS RBA Awal 2022. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-targetkan-penyempurnaan-sistem-oss-rba-awal-2022-lt619ca330a11de?page=all>. diakses 5 Desember 2022

Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. URL: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/oss-berbasis-risiko-permudah-sistem-perizinan-berusaha-umkm>. Diakses 30 Oktober 2022

Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. 2021. URL: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2431101/73701>. Diakses 30 Oktober 2022.

Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. 2021. URL: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2431101/73701>. Diakses 26 April 2023.

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2021. URL: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>, diakses 10 Oktober 2022
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022, URL: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4508/pangkas-kendala-izin-berusaha-bagi-umkm-pemerintah-perkuat-implementasi-undang-undang-cipta-kerja>. Diakses 27 April 2023
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Omzet Pelaku UMKM di Kota Batu Naik saat Libur Lebaran. URL: <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/omzet-pelaku-umkm-di-kota-batu-naik-saat-libur-lebaran/>. diakses 13 Oktober 2022
- Nugroho Lucky Aditya, Pemkot Batu Dorong UMKM Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, malangviva, URL: <https://malang.viva.co.id/politik/447-pemkot-batu-dorong-umkm-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi>. diakses 13 Oktober 2022
- Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan-Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Profil Kota Batu, URL: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/31> diakses 9 Desember 2022
- Richa Irsya, Berkat Wisata, Kota Batu Kini Punya 23.544 Usaha, malangtimes.com. URL: <https://www.malangtimes.com/baca/26767/20180418/105542/berkat-wisata-kota-batu-kini-punya-23-544-usaha> diakses 13 Oktober 2022
- Situs Resmi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, URL: <https://jatim.bpk.go.id/kota-batu/>. Diakses pada 3 Mei 2023.
- OSS Kementerian Investasi/BKPM, 2020, URL: <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2023